

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2018

JL.DEPATI SAID No. 01 Kelurahan. TAPAK LEBAR

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL.DEPATI SAID No. 01 Kelurahan. TAPAK LEBAR

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Peradilan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lubuklinggau, 7 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Negeri Lubuklinnggau MA RI

P O N I J A N, SH

NIP. 19710525 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuklinggau	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	16
B.3 Belanja Barang	16
B.4 Belanja Modal.....	17
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	18
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	18

B.4.4 Belanja Modal Lainnya	19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	20
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	20
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	20
C.3 Piutang Bukan Pajak	24
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	24
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	25
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	29
(TGR).....	29
C.7 Persediaan.....	29
C.8 Persediaan Yang Belum Diregister	34
C.9 Tanah.....	34
C.10 Peralatan dan Mesin	28
C.11 Gedung dan Bangunan	32
C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan	33
C.13 Aset Tetap Lainnya.....	37
C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	37
C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	41
C.16 Piutang Tagihan TP/TGR	42
C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR.....	46
C.18 Aset Tak Berwujud.....	46
C.19 Aset Lain–Lain	47
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	51
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga	51
C.22 Pendapatan Diterima di Muka.....	55
C.23 Uang Muka dari KPPN	56
C.24 Ekuitas	56
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	36

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	36
D.2 Beban Pegawai	36
D.3 Beban Persediaan	41
D.4 Beban Barang dan Jasa	41
D.5. Beban Pemeliharaan	45
D.6 Beban Perjalanan Dinas	46
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	50
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	54
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	41
E.1 Ekuitas Awal	41
E.2 Defisit LO.....	41
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	41
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	41
E.5 Koreksi Lain-lain	41
E.6 Transaksi Antar Entitas.....	41
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	42
E.6.2 Transfer keluar	42
E.7 Ekuitas Akhir	42
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	203
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	203
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	203
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	203

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	13
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2018 dan TA 2017	14
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2018	14
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017	15
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017.....	16
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017.....	16
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017.....	17
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan TA 2017.....	18
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017	18
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2018 dan TA 2017	18
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan TA 2017	19
Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017.....	20
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017.....	20
Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 Error! Bookmark not defined.	
Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2018	25
Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017. 29	
Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2018	29
Tabel 18. Rincian Persediaan	33
Tabel 19. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2018.....	25
Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..... Error! Bookmark not defined.	
Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	51
Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017.....	36
Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017.....	40
Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017	41
Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017.....	45
Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017	45
Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017	50
Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 ..	50
Tabel 29. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017.....	54
Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017.....	55

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jl. Depati Said No. 1 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II

Telp. 0733 321570 Fax. 0733 321570 Kode Pos 31616

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Semester II Tahun 2018 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuklinggau, 7 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

P O N I J A N, SH

NIP. 19710525 199303 1 003

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Semester II Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018. Realisasi Pendapatan Negara TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 18.407.605,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp 22.900.000,00 atau mencapai 80,38 persen. Realisasi Belanja Negara TA 2018 adalah sebesar Rp 480.160.700,00 atau mencapai 85,06 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 564.520.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 6.937.535,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 6.937.535,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 6.937.535,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 18.407.605,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 480.682.700,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 462.275.095,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 400.000,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp (Rp 461.875.095,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp 122.000,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp 461.875.095,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp 0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 468.690.630,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp 6.937.535,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 Desember 2018 DAN 31 Desember 2017

URAIAN	CATATAN	TA 2017			TA 2016		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	3,516,028,000.00	839,510,378.00	23.88	-	825,684,260.00	100.00
Jumlah Pendapatan		3,516,028,000.00	839,510,378.00	23.88	-	825,684,260.00	100.00
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	1,778,057,334,000.00	962,347,197,262.00	54.12	1,794,816,456,000.00	800,093,076,704.00	44.58
2. Belanja Barang	B.3	239,734,362,000.00	59,608,108,041.00	24.86	193,615,036,000.00	74,594,454,298.00	38.53
3. Belanja Modal	B.4	104,913,829,000.00	5,500,612,516.00	5.24	21,858,776,000.00	-	-
Jumlah Belanja		2,122,705,525,000.00	1,027,455,917,819.00	48.40	2,010,290,268,000.00	874,687,531,002.00	43.51

NERACA**Pengadilan Negeri Lubuklinggau****NERACA****PER 31 Desember 2018 DAN 31 Desember 2017**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2018	31 DESEMBER 2017
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	2,000,000,000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2	-	381,970
Piutang Bukan Pajak	C. 3	-	814,320,987.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	(4,071,605)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	810,249,382
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	167,625,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	-	(838,125)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	166,786,875
Persediaan	C. 7	4,991,995,030	4,276,033,081
Persediaan yang Belum Diregister	C. 8	(102,805,758)	-
Jumlah Aset Lancar		6,889,189,272	5,253,451,308
Aset Tetap			
Tanah	C. 9	1,596,991,744,500	1,596,991,744,500
Peralatan dan Mesin	C. 10	494,889,502,475	494,563,621,172
Gedung dan Bangunan	C. 11	737,873,634,732	737,873,634,732
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 12	129,104,684,493	129,104,684,493
Aset Tetap Lainnya	C. 13	34,438,836,264	34,339,608,564
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 14	4,033,425,616	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 15	(467,545,653,925)	(434,207,753,246)
Jumlah Aset Tetap		2,529,786,174,155	2,558,665,540,215
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 16	174,845,880	28,220,880
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 17	(874,229)	(141,104)
Tagihan TP/TGR (Netto)		173,971,651	28,079,776
Jumlah Piutang Jangka Panjang		173,971,651	28,079,776
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 18	10,143,724,647	10,143,724,647
Aset Lain-Lain	C. 19	2,748,534,960	3,954,262,760
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 20	(11,482,472,559)	(12,571,097,121)
Jumlah Aset Lainnya		1,409,787,048	1,526,890,286
JUMLAH ASET		2,538,259,122,126	2,565,473,961,585
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 21	-	11,180,153,664
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 22	-	560,872,692
Uang Muka dari KPPN	C. 23	2,000,000,000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2,000,000,000	11,741,026,356
JUMLAH KEWAJIBAN		2,000,000,000	11,741,026,356
EKUITAS			
Ekuitas	C. 24	2,536,259,122,126	2,553,732,935,229
JUMLAH EKUITAS		2,536,259,122,126	2,553,732,935,229
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2,538,259,122,126	2,565,473,961,585

LAPORAN OPERASIONAL

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN OPERASIONAL
31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

URAIAN	CATATAN	TA 2018	TA 2017
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		589,258,052	521,115,811
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	589,258,052	521,115,811
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	953,254,652,468	799,748,192,426
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	1,449,136,723	1,523,213,407
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	38,556,877,462	52,131,560,149
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	5,999,122,944	7,144,861,166
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	11,382,370,267	11,118,828,350
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	34,399,868,598	32,228,819,916
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	(4,176,605)	(3,161,931)
JUMLAH BEBAN		1,045,037,851,857	903,892,313,483
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1,044,448,593,805)	(903,371,197,672)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		77,000,000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		77,000,000	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		570,444,856	173,678,473
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		7,157,810	1,296,401
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		563,287,046	172,382,072
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	640,287,046	172,382,072
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(1,043,808,306,759)	(903,198,815,600)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2018	DESEMBER 2017
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	2,553,732,935,229.00	1,192,170,047,020
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(1,043,808,306,759.00)	(2,010,794,090,709)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		(184,700,569.00)	1,415,667,775,095
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3		1,418,486,916,941
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4		(2,320,957,242)
Koreksi lain-lain	E. 5	(184,700,569.00)	(498,184,604)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	1,026,519,194,225.00	1,956,689,203,823
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(17,473,813,103.00)	1,361,562,888,209
EKUITAS AKHIR	E. 7	2,536,259,122,126.00	2,553,732,935,229

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Negeri
Lubuklinggau*

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

Visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau mewujudkan :

- a. Terpenuhinya sumber daya manusia Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya yang profesional dan berintegritas.
- b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai.

- c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau:

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi peradilan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.
9. Meningkatkan penatausahaan aset negara.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan

aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

Akuntansi

atas

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2018	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	3,516,028,000	3,516,028,000
Jumlah Pendapatan	3,516,028,000	3,516,028,000
Belanja		
Belanja Pegawai	1,782,527,367,000	1,778,057,334,000
Belanja Barang	239,734,362,000	239,734,362,000
Belanja Modal	104,913,829,000	104,913,829,000
Jumlah Belanja	2,127,175,558,000	2,122,705,525,000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan Rp
18.407.605,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 18.407.605,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 22.900.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2018		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah panitera badan peradilan	650.000,00	705.000,00	108,46
425233	Pendapatan ongkos perkara	3.650.000,00	5.880.000,00	161,10
425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	18.600.000,00	7.480.236,00	40,22
425764	Pendapatan jasa lembaga keuangan / jasa giro		4.342.369,00	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Bruto		22.900.000,00	18.407.605,00	80,38
Pengembalian				0,00
Jumlah Pendapatan Netto		22.900.000,00	18.407.605,00	80,38

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp 4.640.726,00 dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat penurunan dalam pendapatan uang meja, ongkos perkara, kejaksaan dan peradilan lainnya serta jasa lembaga / jasa giro.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2018 dan TA 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2018	TA 2017	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan	705.000,00	645.000,00	60.000,00	9,30
425233	Pendapatan ongkos perkara	5.880.000,00	3.780.000,00	2.100.000,00	55,56
425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	7.480.236,00	18.623.331,00	(11.143.095,00)	(59,83)
425764	Pendapatan jasa lembaga keuangan / jasa giro	4.342.369,00		4.342.369,00	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Netto		18.407.605,00	23.048.331,00	(4.640.726,00)	(20,1)

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada periode 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 480.160.700,00 atau 86.06% dari anggaran belanja sebesar Rp 564.520.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2018 tersaji sebagai berikut:

Realisasi

Belanja

Negara Rp

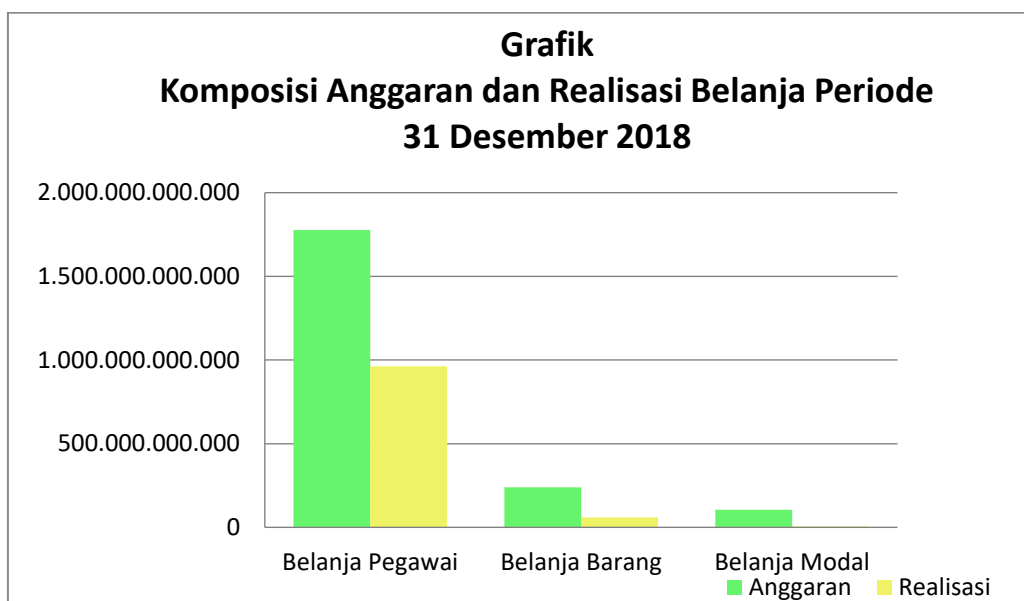
480.160.700,00

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2018

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	1,778,057,334,000.00	962,439,734,156.00	54.13
52	Belanja Barang	239,734,362,000.00	59,719,170,627.00	24.91
53	Belanja Modal	104,913,829,000.00	5,500,612,516.00	5.24
Jumlah Belanja Bruto		2,122,705,525,000.00	1,027,659,517,299.00	48.41
Pengembalian Belanja		-	(203,599,480.00)	0.00
Jumlah Belanja Netto		2,122,705,525,000.00	1,027,455,917,819.00	48.40

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 326.945.500,00 atau sebesar 213,39% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan belanja barang pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Rincian penyebab penurunan belanja akan dijelaskan dalam masing-masing jenis belanja.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	962,347,197,262.00	800,093,076,704.00	162,254,120,558.00	20.28
52	Belanja Barang	59,608,108,041.00	74,594,454,298.00	(14,986,346,257.00)	(20.09)
53	Belanja Modal	5,500,612,516.00	-	5,500,612,516.00	-
Jumlah Belanja Netto		1,027,455,917,819.00	874,687,531,002.00	152,768,386,817.00	17.47

Belanja
Pegawai
Rp 0,00

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2017.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	8,439,623,900.00	8,786,111,500.00	(346,487,600.00)	(3.94)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	117,476.00	105,602.00	11,874.00	11.24
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	670,053,010.00	595,334,640.00	74,718,370.00	12.55
Belanja Tunj. Anak PNS	207,896,102.00	187,051,800.00	20,844,302.00	11.14
Belanja Tunj. Struktural PNS	853,870,000.00	669,475,000.00	184,395,000.00	27.54
Belanja Tunj. Fungsional PNS	715,350,000.00	559,710,000.00	155,640,000.00	27.81
Belanja Tunj. PPh PNS	102,412,299.00	84,917,092.00	17,495,207.00	20.60
Belanja Tunj. Beras PNS	449,076,420.00	474,222,260.00	(25,145,840.00)	(5.30)
Belanja Uang Makan PNS	1,233,457,000.00	965,758,000.00	267,699,000.00	27.72
Belanja Tunjangan Umum PNS	218,305,000.00	216,070,000.00	2,235,000.00	1.03
Belanja Uang Lembur	-	42,938,000.00	(42,938,000.00)	(100.00)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	949,549,572,949.00	787,616,589,098.00	161,932,983,851.00	20.56
Realisasi Belanja Bruto	962,439,734,156.00	800,198,282,992.00	162,241,451,164.00	20.28
Pengembalian	(92,536,894.00)	(105,206,288.00)	12,669,394.00	(12.04)
Realisasi Belanja Netto	962,347,197,262.00	800,093,076,704.00	162,254,120,558.00	20.28

Belanja
Barang Rp
480.160.700,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 480.160.700,00 dan Rp 153.215.200,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp 326.945.500,00 atau sebesar 213,39% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2017. Kenaikan ini diakibatkan naiknya biaya pemeliharaan dan biaya sewa.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	19,930,191,372.00	18,117,542,413.00	1,812,648,959.00	10.00
Belanja Barang Non Operasional	5,487,004,880.00	3,963,241,818.00	1,523,763,062.00	38.45
Belanja Barang Persediaan	2,033,637,850.00	2,217,540,140.00	(183,902,290.00)	100.00
Belanja Jasa	13,876,991,674.00	31,280,172,091.00	(17,403,180,417.00)	(55.64)
Belanja Pemeliharaan	5,996,711,998.00	7,067,097,486.00	(1,070,385,488.00)	(15.15)
Belanja Perjalanan Dinas	12,394,632,853.00	12,061,551,091.00	333,081,762.00	2.76
Realisasi Belanja Bruto	59,719,170,627.00	74,707,145,039.00	(14,987,974,412.00)	(20.06)
Pengembalian	(111,062,586.00)	(112,690,741.00)	1,628,155.00	(1.44)
Realisasi Belanja Netto	59,608,108,041.00	74,594,454,298.00	(14,986,346,257.00)	(20.09)

Belanja

Modal Rp 0,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2017. Penurunan ini dikarenakan terdapat penyesuaian sarana dan prasarana untuk menunjang pencapaian Tugas Pokok dan Fungsi.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,401,384,816.00	-	5,401,384,816.00	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	99,227,700.00	-	99,227,700.00	100.00
Realisasi Belanja Bruto	5,500,612,516.00	-	5,500,612,516.00	100.00
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	5,500,612,516.00	-	5,500,612,516.00	100.00

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2017.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,401,384,816.00	-	5,401,384,816.00	100.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	5,401,384,816.00	-	5,401,384,816.00	100.00
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	5,401,384,816.00	-	5,401,384,816.00	100.00

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2017.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	99,227,700.00	-	99,227,700.00	100.00
Realisasi Belanja Bruto	99,227,700.00	-	99,227,700.00	100.00
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	99,227,700.00	-	99,227,700.00	100.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp
0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni 2018	31 Desember TA 2017
1.	Uang Persediaan per 30 Juni 2018	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

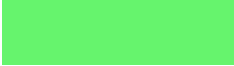
Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dikarenakan tidak adanya pelunasan persekot. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1.	Persekot Gaji A.n. Darmoko Yuti Witanto, SH.	-	381.970,00
JUMLAH		-	381.970,00







Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 14. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

Bagian Lancar
 Tagihan Tuntutan
 Ganti Rugi
 Rp0,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.







Tabel 15. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1.	PT. Amoraindo Utama Karya	-	167,625,000.00
JUMLAH		-	167,625,000.00

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

C.7 Persediaan

Persediaan Rp 6.937.535,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 6.937.535,00 dan Rp 122.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp 6.815.535,00 atau 5.586,50%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :





Tabel 17. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2017	Mutasi	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	3,271,734,998.00	935,982,772.00	4,207,717,770.00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	294,790,346.00	1,989,054.00	296,779,400.00
3	Persediaan lainnya	709,507,737.00	(222,009,877.00)	487,497,860.00
Jumlah		4,276,033,081.00	715,961,949.00	4,991,995,030.00

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Tanggal 7 Januari 2019. Jumlah persediaan yang baik yaitu atas barang konsumsi senilai Rp 6.937.535,00 dan disajikan dalam neraca pada persediaan.

Persediaan yang
belum diregister
Rp 0,00

C.8 Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Adapun rincian atas persediaan yang belum diregister adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Belum di GU kan	(17,420,788.00)
2	Belum di GU kan	(85,384,970.00)
Total		(102,805,758.00)

Tanah Rp 0,00

C.9 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuklinggau per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2018	0,00

Tabel 18. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2018

Peralatan dan
Mesin Rp 0,00

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	-
Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2018	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-







Gedung dan
Bangunan Rp
0,00

C.11 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2016	
Jumlah Mutasi Tambah	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 30 Juni 2018	
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp 0,00

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	
Jumlah Mutasi Tambah	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 30 Juni 2018	
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	







Aset Tetap
Lainnya Rp
0,00

C.13 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terdapat kenaikan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	-
Pembelian	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2018	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Tidak adanya Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang terjadi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp
0,00

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja

dibawah lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

Saldo per 31 Desember 2017	
Perolehan KDP	
Jumlah Mutasi Tambah	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 30 Juni 2018	







Tidak ada Mutasi tambah KDP yang terjadi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap Rp

0,00

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Piutang Tagihan
TP/TGR Rp 0,00

C.16 Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1.	PT. Amoraindo Utama Karya	174,845,880.00	28,220,880.00
JUMLAH		174,845,880.00	28,220,880.00

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 tidak menggambarkan mutasi yang sebenarnya dikarenakan terdapat kesalahan akun dalam penyeteroran, ralat akun tersebut akan diselesaikan pada Rekonsiliasi bulan Januari 2019.

Rincian nilai yang seharusnya adalah :

Uraian	Nilai TGR	Angsuran	Saldo per 30 Juni 2018
PT. Amoraindo Utama Karya	195.845.880	52.000.000	143.845.880







Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Tagihan TP/TGR
Rp 0,00

C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017.

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1.	PT. Amoraindo Utama Karya	Lancar	174,845,880	0,50%	874,229
Total			174,845,880.00		874,229

C.18 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud Rp
0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Negeri Lubuklinggau berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut

:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	
Jumlah Mutasi Tambah	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 31 Desember 2017	
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	

*Aset Lain-Lain**Rp 0,00***C.19 Aset Lain–Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00%.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dalam proses penghapusan dari BMN.







Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo per 30 Juni 2018	
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp 0,00

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	10,143,724,647.00	(9,304,167,537.00)	839,557,110.00
2	Aset Lain-Lain	2,748,534,960.00	(2,178,305,022.00)	570,229,938.00
	Jumlah	12,892,259,607.00	(11,482,472,559.00)	1,409,787,048.00

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
		NIHIL	







Pendapatan

Diterima

Dimuka Rp 0,00

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Jumlah
	NIHIL	

Uang muka dari
KPPN Rp 0,00

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp
6.937.535,00

C.24 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 6.937.535,00 dan Rp 122.000,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp 18.407.605,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 18.407.605,00 dan Rp 23.048.331,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 20. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	589,258,052.00	516,151,351.00	14.16
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		589,258,052.00	516,151,351.00	14.16
Pendapatan Lain-Lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	0.00	0.00	100.00
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0.00	4,964,460.00	(100.00)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0.00	4,964,460.00	(100.00)
Total		589,258,052.00	521,115,811.00	13.08

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pendapatan negara bukan pajak Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati said No. 1.

Beban Pegawai Rp
0,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.









Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

***Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember dan 31 Desember
2017***

(dalam Rupiah)

Beban Persediaan
Rp 108.325.900,00

No	Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	8,434,442,860.00	8,786,588,260.00	(4.01)
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	115,318.00	104,608.00	10.24
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	669,610,628.00	595,670,800.00	12.41
4	Beban Tunj. Anak PNS	207,721,278.00	186,930,336.00	11.12
5	Beban Tunj. Struktural PNS	853,870,000.00	669,475,000.00	27.54
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	715,350,000.00	559,710,000.00	27.81
7	Beban Tunj. PPh PNS	102,378,529.00	84,844,826.00	20.67
8	Beban Tunj. Beras PNS	449,076,420.00	474,061,320.00	(5.27)
9	Beban Uang Makan PNS	1,075,301,000.00	965,758,000.00	11.34
10	Beban Tunjangan Umum PNS	218,290,000.00	214,390,000.00	1.82
11	Beban Uang Lembur	0.00	42,938,000.00	(100.00)
12	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	940,528,496,435.00	787,167,721,276.00	19.48
Total		953,254,652,468.00	799,748,192,426.00	19.19

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 108.325.900,00 dan Rp 32.324.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan
Jasa Rp
176.964.300,00

Tabel 22. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	993,359,588.00	1,310,483,871.00	(24.20)
2	Beban Persediaan Lainnya	455,777,135.00	212,729,536.00	114.25
Total		1,449,136,723.00	1,523,213,407.00	(4.86)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 176.964.300,00 dan Rp 56.100.200,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :







Tabel 23. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	11,087,678,540.00	9,972,943,312.00	11.18
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	498,829,498.00	218,481,380.00	128.32
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5,096,880,000.00	4,330,140,000.00	17.71
4	Beban Barang Operasional Lainnya	3,246,803,334.00	3,595,977,721.00	(9.71)
5	Beban Bahan	4,612,249,880.00	3,405,304,668.00	35.44
6	Beban Honor Output Kegiatan	155,960,000.00	134,760,000.00	15.73
7	Beban Barang Non Operasional Lainnya	718,795,000.00	423,177,150.00	69.86
8	Beban Langganan Listrik	6,173,862,521.00	5,690,060,724.00	8.50
9	Beban Langganan Telepon	175,706,468.00	190,923,822.00	(7.97)
10	Beban Langganan Air	201,079,720.00	203,900,640.00	(1.38)
11	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,760,000.00	0.00	#DIV/0!
12	Beban Jasa Konsultan	0.00	0.00	#DIV/0!
13	Beban Sewa	6,198,188,201.00	23,221,671,132.00	(73.31)
14	Beban Jasa Profesi	69,400,000.00	54,150,000.00	28.16
15	Beban Jasa Lainnya	318,684,300.00	690,069,600.00	(53.82)
Total		38,556,877,462.00	52,131,560,149.00	(26.04)

Beban
Pemeliharaan Rp
12.192.500,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 12.192.500,00 dan Rp 21.119.000,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Beban Perjalanan
Dinas Rp
183.200.000,00

No	Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,250,133,185.00	2,954,080,055.00	(23.83)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	215,154,000.00	388,234,400.00	100.00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,256,783,743.00	3,505,563,248.00	(7.10)
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274,641,070.00	219,219,783.00	25.28
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2,410,946.00	77,763,680.00	(96.90)
Total		5,999,122,944.00	7,144,861,166.00	(16.04)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 183.200.000,00 dan Rp 43.550.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:







Tabel 25. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	5,623,411,303.00	5,192,894,142.00	8.29
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	99,420,000.00	31,500,000.00	215.62
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	3,424,091,070.00	3,373,190,725.00	1.51
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	1,008,510,308.00	592,133,900.00	70.32
5	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,226,937,586.00	1,929,109,583.00	(36.40)
Total		11,382,370,267.00	11,118,828,350.00	2.37

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 0,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	21,729,421,633.00	23,537,138,365.00	(7.68)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10,348,312,441.00	6,382,915,514.00	62.13
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	2,205,031,286.00	2,109,297,771.00	4.54
Jumlah Penyusutan		34,282,765,360.00	32,029,351,650.00	7.04
1	Beban Amortisasi Software	10,353,241.00	102,663,369.00	(89.92)
2	Beban Amortisasi Lisensi	66,019,289.00	56,074,189.00	17.74
Jumlah Amortisasi		76,372,530.00	158,737,558.00	(51.89)
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	40,730,708.00	40,730,708.00	-
Total		34,399,868,598.00	32,228,819,916.00	6.74

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 0,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.







Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp
400.000,00

No	Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNPB	(904,520)	(522,515)	73.11
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(3,167,085)	(2,605,666)	21.55
3	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-	100.00
4	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	(105,000)	(33,750)	211.11
Total		(4,176,605)	(3,161,931)	32.09

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	77,000,000.00		#DIV/0!
2	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-		#DIV/0!
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	44,422,322.00	807.00	5,504,524.78
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	83,911,421.00	96,772,120.00	(13.29)
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	403,887,293.00	54,300,000.00	100.00
6	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	38,223,820.00	22,605,546.00	69.09
7	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	(7,157,810.00)	(1,296,401.00)	452.13
Total		640,287,046.00	172,382,072.00	271.43

0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal Rp
122.000,00*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 122.000,00 dan Rp 0,00.

E.2 Defisit LO

*Defisit LO Rp
(461.875.095,00)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah defisit sebesar Rp (461.875.095,00) dan Rp (130.044.869,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp
0,00*

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp 0,00*

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

E.5 Koreksi Lain-lain

*Koreksi lain-lain
Rp 0,00*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar 0,00 dan Rp 0,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah di Pengadilan Negeri Lubuklinggaut per 31 Desember 2017, berupa Temuan BPK RI Tahun 2016 yang belum selesai di Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah
1	Temuan BPK RI Tahun 2016	(184,700,569.00)
Total		(184,700,569.00)

E.6 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas Rp
468.690.630,00*

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 468.690.630,00 dan Rp 130.166.869,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,027,455,917,819.00
Diterima dari Entitas Lain	(839,510,378.00)
Transfer Keluar	(97,213,216.00)
Pengesahan Hibah Langsung	-
	1,026,519,194,225.00

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp 0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp 0,00.

E.6.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp
6.937.535,00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 6.937.535,00 dan Rp 122.000,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2018 pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2018.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan pemeriksaan BPK RI atas pengadaan barang/jasa pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menuntut penyelesaian berupa pengembalian oleh Pihak Ketiga ke Kas Negara

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2018 MA RI berfungsi sebagai koordinator yaitu menerima uang persediaan (UP) yang kemudian langsung didistribusikan seluruhnya sesuai dengan UP.

Dalam mengelola UP yang diberikan, Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau MA RI menyimpan sisa uang UP/TUP pada brankas dan rekening giro. Pada tahun 2014, rekening giro yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau MA RI sebagai berikut:

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Unit Kerja	Nomor Rek BNI Syariah	Tanggal Pembukaan Rekening
1	Penampung DIPA BUA	012901000042309	S-209/WPB.07/KP.0430/2015
2	Penampung DIPA BADILUM	012901001252305	S-209/WPB.07/KP.0430/2015
3	Penampungan Perkara	012901001796309	S.4556/MK.5/2015

Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Biro Keuangan telah mengajukan permohonan izin pembukaan rekening ke KPPN Lubuklinggau VI melalui Surat No.S-

209/WPB.07/KP.0430/2015 tanggal 2 Januari 2015, dan mendapatkan persetujuan dari Kepala KPPN Lubuklinggau sesuai Surat Nomor: No.S-209/WPB.07/KP.0430/2015 tanggal 2 Januari 2015.

1. Tidak ada penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAIBA 2018.

2. Tidak ada perbaikan Transaksi SPM/SP2D

Bagan Akun Standar					
BAS Semula		Nilai Semula	BAS Koreksi		Nilai Koreksi
Satker	: 663157	Rp 15.923.520	Satker	: 663157	Rp 15.923.520
KPPN	: 175		KPPN	: 175	
Akun	: 522112		Akun	: 522113	
Program	: 1070		Program	: 1070	
Kegiatan/Output	: 1070.994		Kegiatan/O	: 1070.994	
Sumber Dana	: 01		Sumber Da	: 01	
Cara Tarik	: 0		Cara Tarik	: 0	
Register P/H	: 00000001		Register P/	: 00000001	
Kewenangan	: KP		Kewenang:	KP	
Lokasi	: 01.51		Lokasi	: 01.51	
Total			Rp 15.923.520	Total	

Bagan Akun Standar					
BAS Semula		Nilai Semula	BAS Koreksi		Nilai Koreksi
Satker	: 663157	Rp 15.923.520	Satker	: 663157	Rp 15.923.5
KPPN	: 175		KPPN	: 175	
Akun	: 522112		Akun	: 522113	
Program	: 1070		Program	: 1070	
Kegiatan/Output	: 1070.994		Kegiatan/O	: 1070.994	
Sumber Dana	: 01		Sumber Da	: 01	
Cara Tarik	: 0		Cara Tarik	: 0	
Register P/H	: 00000001		Register P/	: 00000001	
Kewenangan	: KP		Kewenang	: KP	
Lokasi	: 01.51		Lokasi	: 01.51	
Total		Rp 15.923.520	Total		Rp 15.923.5

3. Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : SK-23/Pengadilan Negeri Lubuklinggau.3/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : SK-337/Pengadilan Negeri Lubuklinggau.3/KPA/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menunjuk,

Kuasa Pengguna Anggaran	: PONIJAN, SH.
Pejabat Pembuat Komitmen	: PONIJAN, SH.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: RR. SHANDY SATYO ASIH, SE.
Bendahara Pengeluaran	: LENI SARTIKA, A.Md.
Bendahara Penerimaan	: RUSMAN EDWAR, S.Kom.
Operator SIMAK BMN	: ANDERIANSYAH, S.Kom., M.A.P
Operator SAIBA / PERSEDIAAN	: ROLI RAHMADYA, A.Md